

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya masih memiliki ketergantungan keuangan yang sangat tinggi pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
2. Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pada pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dan pendapatan pengelolaan kekayaan alam mengalami selisih dan tidak memenuhi target pendapatan.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa analisis Varians Pendapatan dilihat dari realisasi pendapatan yang diperoleh terhadap anggaran pendapatan yang ditetapkan tahun 2015, 2016 dan 2017 belum efektif, Derajat Desentralisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah tahun 2015 dan 2016 sangat kurang sedangkan tahun 2017 kurang, Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Transfer pada tahun 2015, 2016 dan 2017 rendah sekali, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2015, 2016, dan 2017 sangat efektif, Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2015 dan 2016 kurang efisien sedangkan

tahun 2017 telah efisien. Dengan kata lain Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dinilai berada pada tingkat kemampuan yang kurang baik. Dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola anggaran belanja berada pada tingkat yang sudah baik.

B. Saran

Berdasarkan penarikan kesimpulan yang didapatkan, maka saran yang diberikan penulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai bahan pertimbangan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya harus mengurangi ketergantungan terhadap dana bantuan dari Pemerintah Pusat, agar dapat mencapai kondisi tingkat kemampuan keuangan yang ideal. Caranya, dengan mengoptimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk mengurangi besarnya dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset dalam mengelola pendapatan daerah harus lebih maksimal lagi agar bisa menghasilkan pendapatan yang lebih baik di tahun berikutnya, sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya harus lebih maksimal lagi agar bisa menghasilkan pendapatan yang lebih baik. dan Pemerintah

4. Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya juga harus mempertahankan dan meningkatkan efisiensi belanja modal.



DAFTAR PUSTAKA

- Basri,Ramlan.2013.”*Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara*”.Jurnal Emba ISSN 2304 – 1174.Vol.2, No.3, Hal. 952-961.
- Bastian Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Gamal, Maria Anggreani. 2017. *Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu*. Skripsi Universitas Widya Karya Malang, tidak untuk diterbitkan
- Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Hermawan Erry. 2011. *Analisis Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja di Lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan-Sekretaris Negara RI*. Tesis . fakultas Ekonomi Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Kekhususan Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah. Universitas Indonesia. Jakarta
- Kamaliah, Edfan Darlis, dan Viorita Virsanita 2010. *Pengaruh Perilaku Oportunistik Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dengan Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Pegawai Pemerintah Kabupaten Kota dan Provinsi di Provinsi Riau)*. Skripsi FE. Universitas Riau
- Kuncoro, Mudrajad.2009.*Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIE YKPN
- Mahmudi. 2016. *Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik Suatu Sasaran Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol.2 no.1 Mei 2006
- Mardiasmo., 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- M.Nafarin.2009. *Penganggaran Perusahaan* . Jakarta : Salemba empat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Widengga, Galuwesius. 2015. *Analisis Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digoel*. Skripsi. Universitas Katolik Widya Karya

Wiratna, Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru

